

Pancasila Sebagai Jati diri Bangsa: Kepemimpinan Nasional dan Nasionalisme Pemuda Masa Kini¹

Hastangka
(Pusat Studi Pancasila UGM)

Pengantar

Tulisan ini merupakan catatan reflektif penulis yang mencoba untuk mengkaji dinamika pemikiran Pancasila dari masa klasik hingga kontemporer. Penulis mencoba untuk melakukan analisis kritis dan memaparkan secara singkat untuk melihat bagaimana perkembangan wacana dan dialetika pemikiran tentang Pancasila dari klasik hingga kontemporer. Patut kita renungkan bahwa perjalanan pemikiran Pancasila pada fase perumusan dasar negara yaitu Pancasila hingga sekarang ini merupakan suatu proses yang panjang dan berliku. Pidato Soekarno, 1 Juni 1945 di depan sidang BPUPK menjadi dasar dan alasan pentingnya mengkaji Pancasila berangkat dari pidato Soekarno tersebut. Tentu saja, para pendidik, dan para pengkaji Pancasila mencari sebab mengapa 1 Juni 1945 dijadikan dasar sebagai hari lahirnya Pancasila. Jawaban yang sering muncul adalah karena 1 Juni 1945 merupakan pidato Soekarno yang monumental menyebutkan dasar falsafah bangsa Indonesia merdeka adalah Pancasila. Kata Pancasila pertama kali diucapkan oleh Soekarno dalam pidato 1 Juni tersebut. Sehingga, hari lahirnya Pancasila ditetapkan pada tanggal tersebut. Meskipun dalam perkembangannya, susunan Pancasila yang disampaikan dalam pidato Soekarno 1 Juni 1945 mengalami perubahan (dan yang sekarang dipakai adalah hasil dari konsensus bersama dari para pendiri Negara). *Dasar kedua*, tentu saja bahwa Pidato Soekarno menjadi titik tolak dinamika pemikiran Pancasila pada fase perumusan dasar negara karena pada waktu itu, Ketua sidang BPUPK, Radjiman Wedodiningrat mengajukan pertanyaan kepada para anggota sidang: Apa dasar Negara Indonesia yang akan kita bentuk?

¹ Materi ini pernah disampaikan pada matrikulasi Kepancasilaan untuk BEM KM UGM pada tanggal 19 April 2014 di Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada.

Pertanyaan ketua sidang tersebut menjadi awal dinamika pemikiran tentang Pancasila. Perdebatan mulai dari aspek filosofis hingga politik. Justru, apa yang dipersoalkan pada waktu itu adalah persoalan klasik yaitu membahas tentang bentuk negara, ideologi yang perlu dimiliki, dan konsep negara yang seperti apa yang akan dirumuskan. Berbagai polemik bermunculan, kalau kita mencermati bahwa hakikat yang diperdebatkan adalah menyoal persoalan manusia Indonesia seperti apa yang kita inginkan?, secara geopolitik, Indonesia terdiri dari ribuan pulau, dan memiliki wilayah terluas dan terbesar di kawasan Asia Tenggara. Selain itu, Indonesia terdiri dari suku bangsa, bahasa, dan budaya. Apa yang memperkuat kita sebagai bangsa?, apakah perasaan senasib?, apakah karena tinggal pada satu wilayah yang sama?, atau apakah karena persamaan warna kulitnya?, tentu bukan demikian, Persoalan kebangsaan, nasionalisme, dan semangat identitas nasional menjadi isu-isu klasik yang muncul pada saat perumusan dasar falsafah bangsa yaitu Pancasila.

Fase tersebut kemudian berkembang hingga, proses terbentuknya pemerintahan Indonesia paska kemerdekaan yaitu pada masa kepemimpinan Soekarno. Di bawah kepemimpinan Soekarno dan Hatta, Indonesia menjadi suatu negara yang memiliki jargon-jargon politik yang dapat mempengaruhi kondisi masyarakat internasional. Isu-isu tentang kemerdekaan, persamaan hak asasi, menentukan nasib sendiri, bangsa berdikari, bangsa berdaulat, dan merdeka menjadi jargon politik yang laku terjual pada masa itu. Setelah kepemimpinan Soekarno tumbang dan digantikan oleh Soeharto, Pancasila digunakan sebagai jargon politik untuk indoktrinasi bagi masyarakat Indonesia yang begitu majemuk, seperti menegakkan Pancasila secara murni dan konsekuen, demokrasi Pancasila, program P4, dan Pendidikan Moral Pancasila. Pancasila menjadi paradigma untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya. Manusia yang memiliki kepribadian berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

Namun, setelah 32 tahun, Presiden Soeharto berkuasa melalui gerakan reformasi 1998/999, Pancasila di era reformasi mengalami fase krisis. Persoalan Pancasila selalu dibenturkan dengan persoalan sosial, ekonomi, politik, budaya, dan hukum. Dimana keadaan masyarakat sedang kacau, muncul berbagai konflik sosial, intoleransi agama,

kemiskinan, korupsi sebagai persoalan kontemporer. Maka Pancasila mulai dibahas dan dibicarakan, dimanakah Pancasila? Kongres Pancasila yang telah diinisiasi oleh Universitas Gadjah Mada sejak 2009 (UGM), 2010 (Udayana), 2011 (UNAIR), 2012 (UGM), 2013 (rencana di Unsri, namun oleh karena kondisi yang tidak memungkinkan dipindah di UGM), dan Kongres Pancasila VI di Unpatti (Ambon) 2014. Kongres Pancasila menjadi salah satu upaya untuk menyelamatkan Pancasila dari keterasingan dan menara gading. Kongres Pancasila menjadi oase di padang gurun untuk membangun kembali jati bangsa dan membentuk manusia Pancasila. Mengapa Pancasila menjadi ikon bangsa kita karena Pancasila adalah *the Indonesian dream* yang masih dalam proses *menjadi* untuk direalisasikan paska reformasi ini. Tentu saja Pancasila menjadi pedoman, tuntutan, dan arahan kita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara bukan untuk mengurus wilayah *private* setiap individu. Menjadi Manusia Pancasila merupakan keniscayaan untuk membangun bangsa yang bermartabat, berdikari, dan berdaulat di tengah-tengah tantangan global. Menjadi Manusia Pancasila yang diharapkan dalam hal ini adalah kembali menyadari rasa kebangsaan kita dan memiliki bangsa ini untuk masa depan generasi bangsa Indonesia.

Menoropong Geo-Ideologi Dunia

Perang ideologi di era globalisasi sungguh nyata. Persoalan ideologi menjadi persoalan yang krusial dalam membangun suatu bangsa yang merdeka dan berdaulat. Untuk menjadi bangsa yang merdeka boleh dikatakan mudah karena suatu negara bisa diakui keberadaannya karena empat hal yaitu ada wilayah, penduduk yang menetap, ada pemerintahan, dan ada pengakuan dari negara lain. hal ini tidak peduli apakah rakyatnya pintar, kaya, bisa baca dan menulis atau bisa bekerja. Namun berbeda untuk menjadi bangsa dan negara yang merdeka dan berdaulat. Kedaulatan menjadi harga mahal di negeri yang sudah 68 tahun merdeka ini.

Apa yang membuat kedaulatan negara menjadi mahal di negeri bernama Indonesia. Negeri yang katanya kaya raya memiliki sumber daya alam yang melimpah ruah namun kekayaan yang begitu besar tidak pernah dirasakan dan dinikmati oleh bangsa sendiri. Apa

yang tidak impor dari negeri sendiri mulai dari bahan makanan seperti beras, gandum, buah, garam, daging sapi, gula, susu, dan kedelai sebagai bahan pokok masyarakat Indonesia sampai hari ini tidak pernah berdaulat di negeri sendiri. Ada apa dengan negeri ini? menjaga kedaulatan wilayah dari Sabang sampai Merauke sudah tidak mampu beberapa pulau-pulau terluar di Indonesia satu demi satu lepas dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) seperti pulau Irian dan pulau Sipadan. Kemudian, Indonesia diguncang isu dan realitas pulau yang dijual oleh perusahaan swasta baik asing maupun domestik. Lemahnya pertahanan dan keamanan Indonesia baik wilayah udara, laut dan darat di daerah perbatasan telah dimanfaatkan oleh negara-negara tetangga untuk menyusup dan bermanuver di wilayah NKRI. Tampaknya perang belum usai, berbagai ancaman terlepasnya pulau-pulau terluar semakin nyata dan hingga sampai hari ini tidak ada solusi dan kepastian bagaimana menyelamatkan pulau-pulau terluar di Indonesia dari kepentingan asing.

Banyak para petinggi negara di republik ini mulai berpikir simplistik, pragmatik, dan jangka pendek. Lebih baik impor beras daripada memperbaiki lumbung-lumbung beras di Indonesia, lebih baik impor bahan mentah daripada membuat pabrik-pabrik dan kilang minyak baru, lebih baik menyewa kapal tanker untuk mengekspor minyak mentah daripada memiliki kapal sendiri. lebih banyak mengundang investor asing untuk mengelola aset negara dan sumber daya alam di negeri ini daripada membangun perusahaan-perusahaan raksasa nasional untuk mengelola sumber daya alam sendiri. Ideologi apa yang menjadikan para petinggi negara sampai presiden merelakan kekayaan bangsanya dieksploitasi dan dikuras habis untuk kepentingan golongan tertentu. Akibat dari lemahnya sistem kontrol dan absennya pemimpin negara membuat hukum tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. berbagai kasus hukum yang melibatkan pejabat negara, pengusaha, dan anggota legislatif, kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman tidak pernah tuntas. Mau dimana kemana bangsa ini? Para ilmuwan sibuk oleh karena hiruk-pikuknya kehidupan kampus mengejar proyek, mengumpulkan kredit untuk kenaikan pangkat, sibuk seminar sini dan seminar sana untuk kepentingan diri sendiri. Sekarang, bangsa Indonesia sedang diselimuti dengan banyak orang-orang yang hanya mementingkan dirinya dan kelompoknya sendiri.

Proses de-ideologisasi semakin nampak ketika UU No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional pada pasal 37 tidak memasukkan Pendidikan Pancasila sebagai mata pelajaran wajib di sekolah. hal tersebut telah mereduksi kekuatan bangsa Indonesia yang memiliki ciri khas ideologi yang berbeda dengan bangsa-bangsa lain. Generasi bangsa Indonesia semakin dihilangkan dari sejarah dan pada akhirnya mereka tidak mengenal bangsanya. Ancaman ideologi adalah ancaman yang serius terhadap eksistensi bangsa Indonesia. Sosialisasi empat pilar yang dilakukan oleh MPR RI telah membawa dampak pada lemahnya para pelajar Indonesia tentang pentingnya Pancasila sebagai ideologi pemersatu. Justru, sosialisasi empat pilar yang dilaksanakan oleh MPR RI menyebut Pancasila sebagai pilar kehidupan berbangsa dan bernegara **(Sekarang sudah dibatalkan oleh MK)**. Pancasila dalam konteks sejarah dan yuridis-filosofis adalah dasar negara bukan sekedar pilar. Penghilangan dasar falsafah bangsa yaitu Pancasila sungguh nyata.

Realitas kehidupan berbangsa dan bernegara semakin runyam berbagai pemberitaan di media-media baik cetak maupun elektronik semakin mengkhawatirkan terhadap persatuan dan kesatuan. Berbagai aksi tawuran antar pelajar, antar kampung dan bahkan kasus korupsi, terorisme, narkoba mewarnai media sekarang ini. Bangsa ini sudah masuk dalam perangkap ideologi tanpa ideologi. Kepentingan kelompok lebih utama daripada kepentingan bangsa dan kepentingan partai lebih penting daripada kepentingan masyarakat banyak. Berbagai aksi kriminalitas semakin marak tetapi peraturan tidak pernah ditegakkan. Para aparat penegak hukum pun terjerat oleh berbagai kasus hukum dan kriminal seperti korupsi, narkoba, dan tindak kejahatan lainnya.

Kegelisahan anak bangsa semakin memuncak bahwa ideologi bangsa yaitu Pancasila sebagai ketahanan bangsa semakin rapuh dan dikebiri. Negeri ini tidak mampu apabila tidak memiliki basis ideologi yang kuat untuk membangun bangsa. Kenapa ideologi penting karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang berbeda dari bangsa-bangsa lain yang tidak memerlukan dasar ideologi sebagaimana di Indonesia. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk yang memiliki berbagai macam kepentingan, kebutuhan, dan ideologi. Persatuan dan kesatuan perlu dijalin dan dikukuhkan dengan apa persatuan dan

kesatuan dikukuhkan yaitu dengan ideologi yang prinsip-prinsipnya ada di setiap wilayah bangsa ini. Bahwa penyelenggara negara sekarang ini tidak pernah paham terhadap arti pentingnya ideologi bangsa. Kenapa bangsa ini lemah, banyak tawuran, kejahatan, terorisme, dan konflik komunal karena ideologi Pancasila sampai sekarang belum diterapkan secara konsisten dan konsekuen. serta dikhianati oleh bangsa sendiri.

Pemuda dan Kepemimpinan Nasional

Persoalan kepemimpinan dan sosok pemimpin yang diidolakan dan diimpikan oleh generasi muda Indonesia ke depan adalah menyangkut persoalan harkat dan martabat,serta kedaulatan bangsa. Berbagai partai politik yang sedang berproses menuju pertarungan dan perebutan kekuasaan di tahun pemilihan umum ini tentu saja telah membawa perhatian masyarakat, Siapa sebenarnya yang layak menjadi R 1 dan mengapa ia layak menjadi R 1 untuk memimpin negeri ini dan membebaskan dari kemiskinan,kebodohan,dan korupsi.

Saya berpendapat bahwa persoalan mendasar bangsa Indonesia yang kompleks dan mengalami krisis multidimensional yang tidak kunjung usai (politik,sosial,budaya, ekonomi, pertahanan dan keamanan, hukum, Tata Negara,Filsafat) tidak hanya disebabkan oleh salah satu aktor saja tetapi multi aktor yaitu di mulai dari penyelenggara negara (Eksekutif, Yudikatif, dan Legislatif),serta makelar kasus politik. Persoalan garis kepemimpinan yang tidak jelas dan tegas sebagaimana yang terjadi sekarang ini, misalnya, bagaimana bisa seorang presiden harus berkorban lebih banyak demi menyelamatkan partai politiknya daripada menyelamatkan rakyat Indonesia yang masih kelaparan, miskin, bodoh, dan terbelakang. Seorang presiden malah lebih fokus dan konsentrasi untuk kampanye demi menyelamatkan citra partai yang semakin buruk oleh karena ulah para kadernya. Lalu, kriteria seorang pemimpin yang seperti apa yang diidealkan oleh rakyat Indonesia?, apakah seperti Kim Jong Un (Korut), Vladimir Putin (Rusia), Angela Markel (Jerman), Xi Jinping (China), Tony Abbott (Australia), atau para pemimpin pendahulu seperti Hugo Chaves (Venezuela), Hosni Mubarak (Mesir), Nelson Mandela (Afrika), Sadam Husein (Irak), Ratu Elizabeth II (Inggris), Perdana Menteri Tony Blair (Inggris), Mahatma Gandhi (India), Soekarno (Indonesia), Soeharto (Indonesia), atau mendambakan sosok pemimpin dari

jaman nusantara seperti Raden Wijaya, Sri Maharaja Balaputra Dewa, Tribuana Tungga Dewi, dan Patih Gadjah Mada, atau mendambakan sosok pemimpin dari dunia pewayangan seperti Prabu Kresna, Semar, Bima,dll.

Kasus krisis kepemimpinan dan pemimpin tidak hanya terjadi di Indonesia tetapi juga melanda di beberapa Negara seperti Timur Tengah,Afrika Barat, Afrika Utara, Amerika Latin, Amerika Serikat, Korea Selatan, Korea Utara, India, Pakistan, Thailand, Kamboja, Myanmar, dan hampir di Negara di kawasan Asia Tenggara sedang mencari format pemimpin ideal. Krisis di Suriah, Libya, dan Mesir menjadi salah satu buktinya nyata bahwa kekosongan pemimpin yang dapat menengahi dan menjadi kekuatan penyeimbang antara dua kubu yang berseberangan atau lebih adalah sangat penting. Jatuhnya rezim diktator yang melanda kawasan Afrika Utara dan Timur Tengah sebagai salah satu pengalaman bahwa tidak ada pemimpin yang abadi, dan tidak ada pemimpin yang ideal selama kesepakatan bersama (*common consensus*) untuk membangun bangsa dan Negara dilanggar dan diabaikan.

Kejayaan Mesir dan transisi demokrasi yang terjadi di Mesir juga belum melahirkan seorang pemimpin yang ideal bagi negaranya karena ideal menurut rakyat belum tentu ideal menurut kelompok yang berkepentingan di negara tersebut. Apa yang menjadi persoalan mendasar apabila kita melihat pengalaman dari Mesir, Suriah dan Negara-negara di Afrika Barat lainnya adalah persoalan belum adanya *platform* yang jelas setelah jatuhnya rezim diktator, mau dijadikan apa negara tersebut ke depan?, berbeda dengan Indonesia, kelebihan Negara Indonesia adalah dalam pembukaan UUD 1945 alenia 4 menyatakan:

“...Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang **melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia** dan **untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa,dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial**, maka disusunlah kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Titik tolak untuk mengenali sosok pemimpin atau membuat indikator/kriteria pemimpin nasional di Indonesia sudah seharusnya berpijak pada pembukaan UUD 1945 alenia 4 sebagai dasar nilai utama dan acuan pragmatis. Bahwa seorang pemimpin nasional tentu harus memiliki impian Indonesia ke depan yang sudah diamanatkan para pendiri bangsa dan mereka sebagai pemimpin patut merealisasikannya yaitu 1). melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, berarti, Negara wajib dan bertanggung jawab untuk melindungi segenap warga negaranya dari segala macam ancaman baik dari dalam maupun dari luar dengan menggunakan segala macam cara. Keamanan, kenyamanan, dan keselamatan warga Negara Indonesia harus menjadi prioritas Negara dimanapun warga Negara tersebut berada, Negara tidak boleh diskriminasi dalam proses pemberian keamanan dan wajib melindungi golongan minoritas apapun yang ada di Republik ini. 2) untuk memajukan kesejahteraan umum, berarti, Negara wajib dan bertanggung jawab untuk memberikan jaminan dan upaya untuk mensejahterakan rakyatnya dengan segala potensi dan sumber dayanya, kekayaan alam Negara dan bangsa Indonesia harus difokuskan untuk dapat mensejahterakan rakyatnya bukan untuk kepentingan golongan tertentu. 3) mencerdaskan kehidupan bangsa, berarti rakyat Indonesia harus mendapatkan jaminan pendidikan yang baik, berkualitas dan tidak harus mahal, warga Negara dijamin oleh Negara untuk tetapi bisa mendapatkan pendidikan, menuju masyarakat *well educated*. dan 4) ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, berarti Negara wajib memperkuat peran dan kiprahnya di masyarakat internasional untuk menjaga dan berperan aktif dalam perdamaian dunia. Dunia tanpa perang.

Ironisnya, apa yang kita lihat dalam praktek kampanye Bakal calon presiden RI dan Wakil Presiden RI yang diusung oleh beberapa partai politik cenderung tidak memiliki impian Indonesia ke depan dan malah meninggalkan amanat dari pembukaan UUD 1945. Ada bakal calon yang sudah membuat program dan menawarkan berbagai solusi parsial terhadap persoalan makro bangsa Indonesia. Para calon presiden RI atau partai politik yang mengusung para kandidat tersebut justru jarang menawarkan konsep *nation-state* seperti apa yang akan diletakkan ketika memimpin Negara Indonesia berdasarkan Pancasila dan pembukaan UUD 1945. Artinya, para calon pemimpin sekarang ini telah kehilangan jati

diri bangsa, kehilangan pijakan atas dasar apa Indonesia merdeka ini ada, serta tidak mengenali roh dan filosofi bangsanya sendiri. Pemuda seharusnya mampu membuat rumusan konseptual terkait pemimpin yang ideal, Pancasila hanya bisa terealisasi dalam konteks kepemimpinan dan kebijakan dari para pemimpin. Seorang pemimpin perlu memiliki komitmen terhadap realisasi nilai-nilai Pancasila.